

RESPON MASYARAKAT DESA TEROS TERHADAP PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

HARTATI, WIDYA

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Muhammadiyah
Selong-Lombok Timur

e-mail: widyahartaty@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keikutsertaan masyarakat pada program Jaminan Kesehatan Nasional di Desa Teros. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menjabarkan hasil penelitian sebagaimana adanya. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Respon masyarakat Desa Teros terhadap program pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bahwa pada umumnya masyarakat Desa Teros mengetahui tentang program pemerintah tersebut tetapi secara khusus masyarakat kurang mengetahui berbagai istilah dalam program tersebut. Hal ini dilihat dalam kwisioner sebanyak 50 lembar yang disebar ke warga masyarakat desa teros secara acak bahwa berdasarkan distribusi umur responden, umur 30-40 tahun yang lebih banyak berpartisipasi dan paling sedikit umur 50 tahun. Kemudian berdasarkan pekerjaan responden yang di luar grafik atau mempunyai pekerjaan lain memiliki partisipasi paling banyak 39%. Berdasarkan hasil kwisioner yang disebar kepada 50 responden dari 10 pertanyaan yang disediakan bahwa program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang bersifat wajib bagi masyarakat, sebenarnya masyarakat sudah mengetahui tentang program tersebut baik itu membaca lewat media massa maupun dilihat dalam media televisi mengenai program tersebut tetapi masyarakat desa teros masih kurang faham aturan-aturan atau prosedur-prosedur yang harus di tempuh untuk berpartisipasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut, padahal program ini sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama di daerah pedesaan karena diketahui bahwa bagi masyarakat yang kurang mampu maka biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh pemerintah tetapi hal ini harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

Kata Kunci: *Jaminan kesehatan Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, pelayanan kesehatan*

ABSTRACT

This study aims to determine the level public participation in the program The National Health Insurance in the village of Teros. This is a descriptive study that procedure solving issues investigated by describing / depicting objects research at the present time based on the facts that appear. In this study the methods of analysis used is qualitative analysis is to describe the results research as it is. This research was conducted in the village of Teros, District Labuhan Haji East Lombok. The results showed that response. Teros village community to the government program of the National Health Insurance (JKN) that generally Teros Village community aware of the program The government specifically but people are not aware of various terms within the program. It is seen in as many as 50 sheets kwisioner distributed to citizens Teros randomly village that is based on the age distribution of respondents, aged 30-40 years were more participating and at least 50 years of age. Then based on respondents who work outside the chart or have other work to have the participation of at most 39%. Based on the results of which were distributed to 50 kwisioner respondents from 10 question provided that the national health insurance program (JKN) which is mandatory for the public, the public actually already know about the program either read through the mass media as well as seen in the television media about the program but villagers Teros still not sure what the rules or procedures that must be traveled to participate in the program The National Health Insurance, but this program is critical to improving health care, especially in rural areas because it is known that for the poor then health care costs borne by the government but this should be in accordance with established procedures.

Keywords: National health insurance, Social Security Agency of Health, health services.

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat, maka kesehatan adalah hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, maka negara harus menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana. Falsafah dan dasar negara Pancasila terutama sila ke-5 juga mengakui hak asasi warga negara atas kesehatan. Hak ini juga termaktub dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 28H Ayat (3) mengenai hak terhadap jaminan sosial dan pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan nasional.

Untuk mewujudkan komitmen konstitusi maka pemerintah bertanggung jawab dalam pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi warga negara Indonesia sehingga masyarakat Indonesia memperoleh jaminan kesehatan yang terjangkau dan memadai. Untuk mencapai hal tersebut sesungguhnya pemerintah telah merintis jaminan sosial dibidang kesehatan yaitu melalui PT. Askes (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain PNS (Pegawai Negeri Sipil), Pensiun Pegawai Negeri, Veteran dan Pegawai Swasta. Sedangkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pemerintah menyediakan atau memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada

warga negara yang hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar atas kesehatan belum terpenuhi secara layak karena belum mendapatkan pelayanan sosial dari negara. Sehingga akibatnya masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan yang layak.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem jaminan sosial adalah upaya mewujudkan kesejahteraan, memberikan rasa aman sepanjang hidup manusia melalui pendekatan sistem. (Sulastomo: 2008) sistem ini dikatakan sebagai salah satu bentuk proteksi sosial. Undang-Undang 40 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk Jaminan Kesehatan Nasional yang berada dalam naungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Di beberapa negara juga sudah menerapkan sistem jaminan kesehatan. Setiap negara memiliki sistem dan mekanisme yang berbeda satu sama lain. Namun semuanya mengarah pada pencapaian tiga tujuan dasar sistem perawatan kesehatan yang relatif sama, yakni: menjaga agar orang tetap sehat, merawat orang yang sakit, dan melindungi keluarga dari kebangkrutan finansial akibat tagihan medis. (Edi Suharto: 2013).

Selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 yang mengamanatkan Sistem Jaminan Sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia ada juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang menetapkan Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang terdiri atas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Selanjutnya Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang pelaksanaannya sudah dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Secara operasional, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, yaitu antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan serta Peta Jalan JKN (*Roadmap* Jaminan Kesehatan Nasional).

Dengan melihat nilai penting dari program JKN maka akan sangat diperlukan suatu data penelitian tentang bagaimana tingkat keikutsertaan masyarakat dalam program ini. Tingkat keikutsertaan masyarakat akan dapat mencerminkan tingkat keberhasilan program JKN

dalam pelaksanaannya. Dengan tingkat keikutsertaan masyarakat akan sangat berkaitan dengan tingkat kepedulian masyarakat terhadap tingkat perlindungan masyarakat dibidang kesehatan. penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Teros kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur.

METODE ANALISIS

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya (Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2006). Penelitian ini dilakukan di Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu dengan menjabarkan hasil penelitian sebagaimana adanya dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Editing, yaitu meneliti data-data yang diperoleh dari hasil penelitian.

2. Koding, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari hasil penelitian.

3. Membuat kategori untuk mengklasifikasikan agar data mudah dianalisis dan disimpulkan serta menjawab masalah yang ditemukan dalam penelitian sehingga jawaban yang beraneka ragam dapat disingkat.

Data yang telah dikumpulkan akan di analisis dengan metode skala likert yang digunakan untuk mengukur respon dengan indikator sikap, persepsi dan partisipasi pada setiap pertanyaan yang memiliki kisaran dari satu sampai tiga. Pada penelitian ini data responden akan diuji dengan menggunakan tabel tunggal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

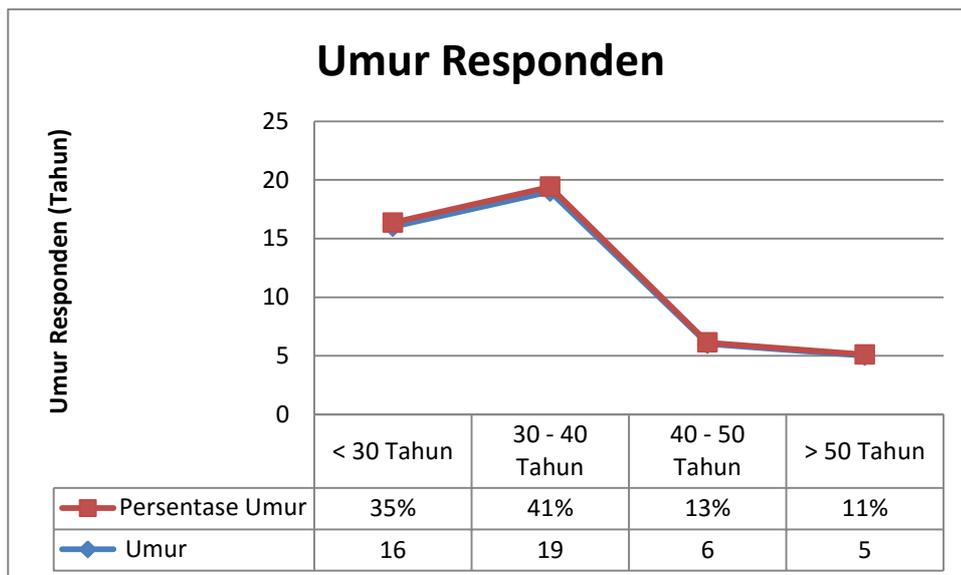
Pelaksanaan penelitian telah dilakukan dengan menggunakan 50 (lima puluh) responden. Responden yang digunakan berasal dari Desa Teros. Adapun data responden yang digunakan telah dilampirkan, dan data hasil penelitian dapat dilihat di tabel bawah ini :

Tabel V.1. Hasil Kuisisioner Penelitian

Pertanyaan	Tahu	% Tahu	Kurang tahu	% Kurang Tahu	tidak tahu	% tidak tahu
1	34	74%	11	24%	1	2%
2	29	63%	14	30%	3	7%
3	24	52%	16	35%	6	13%
4	11	24%	22	48%	12	26%
5	10	22%	23	50%	13	28%
6	21	46%	11	24%	14	30%
7	16	35%	10	22%	20	43%
8	27	59%	14	30%	5	11%
9	18	39%	22	48%	6	13%
10	20	43%	17	37%	9	20%

Pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini ada 10 (sepuluh) item, yaitu :

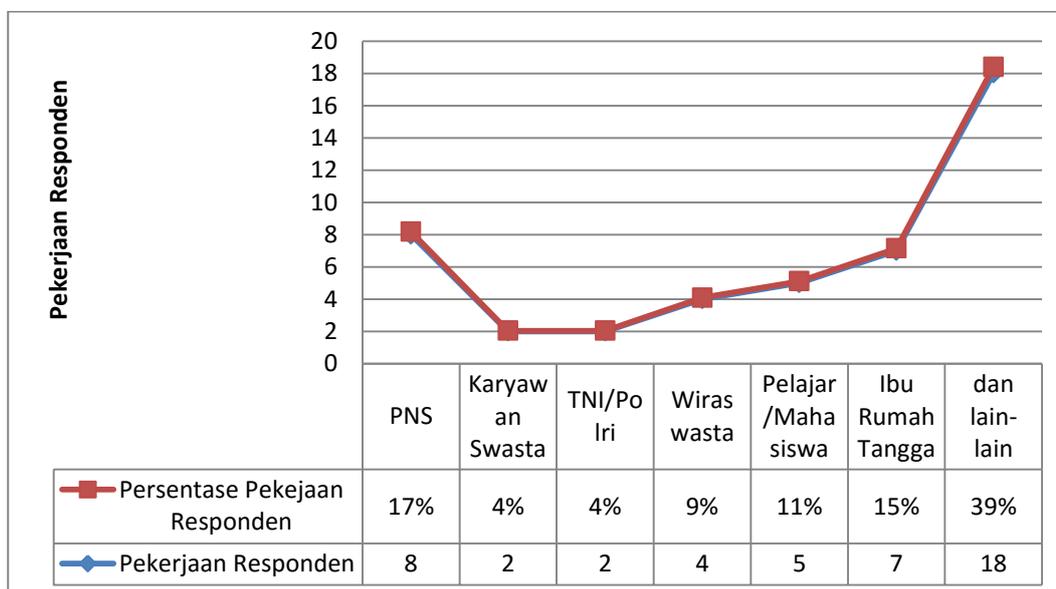
No	Pertanyaan
1	Apakah anda tahu apakah itu Jaminan Kesehatan Nasional
2	apakah anda tahu tujuan diadakannya program JKN
3	Apakah anda tahu siapa saja yang menjadi anggota JKN
4	Apakah anda tahu apa itu peserta penerima bantuan iuran
5	Apakah anda tahu apa itu peserta bukan penerima bantuan iuran
6	Apakah anda tahu berapa iuran peserta JKN
7	Apakah anda tahu tentang denda keterlambatan iuran peserta JKN
8	Apakah anda tahu apa manfaat sebagai anggota JKN
9	Apakah anda tahu tentang apa saja pelayanan dari program JKN
10	Apakah anda tahu tentang perbedaan pelayanan JKN dengan orang yang belum terdaftar sbg anggota JKN



Gambar V.

Penilaian terhadap umur responden diketahui bahwa responden yang memiliki umur kurang dari 30 tahun persentasenya sekitar 35%, selanjutnya umur responden yang berkisar antara 30 tahun sampai 40 tahun persentasenya 41%, dan umur responden yang memiliki umur 40 tahun sampai 50 tahun persentasenya sebanyak 13% serta umur responden diatas 50 tahun persentasenya sebanyak 11%. Berdasarkan distribusi umur

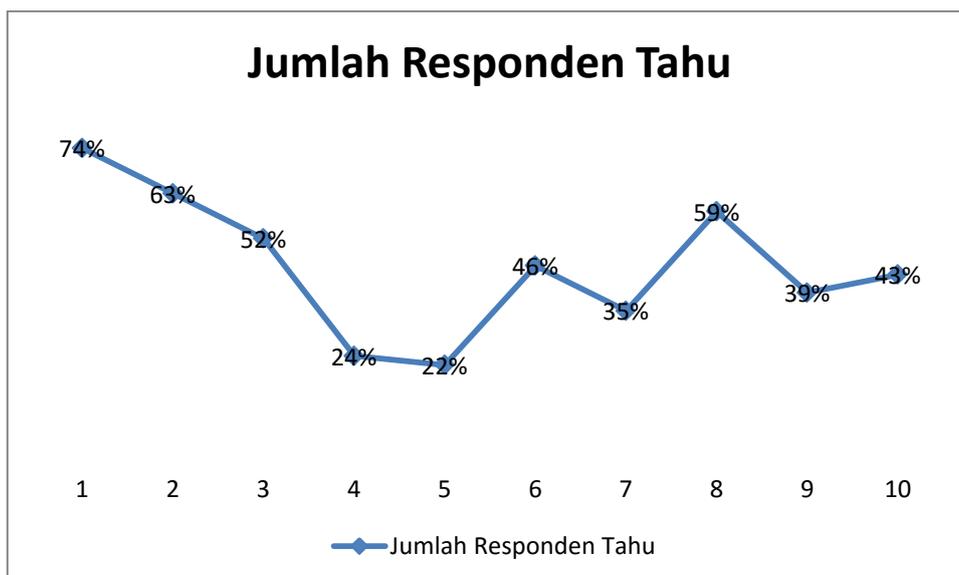
responden diketahui bahwa umur responden dari umur 30-40 tahun yang lebih banyak berpartisipasi yaitu sekitar 41%. Kisaran umur responden di atas berada pada kisaran umur produktif artinya secara fisik dan mental mempunyai kemampuan untuk merespon terhadap suatu program baru yang dicanangkan pemerintah di bidang kesehatan.



Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang memiliki pekerjaan diluar dari grafik diatas atau memiliki pekerjaan lain-lain persentasenya sebanyak 39%. Jawaban responden berdasarkan jenis pekerjaan berarti yang memiliki persentase lebih banyak dari pekerjaan yang lain atau diluar pekerjaan yang ada di grafik yaitu sebanyak 39%. Artinya bahwa jumlah responden yang memiliki pekerjaan

yang diluar dari jenis pekerjaan di tabel yang lebih banyak mengisi kwisioner yang disebar dan tentunya telah mengetahui tentang program jaminan kesehatan nasional yang merupakan program pemerintah.

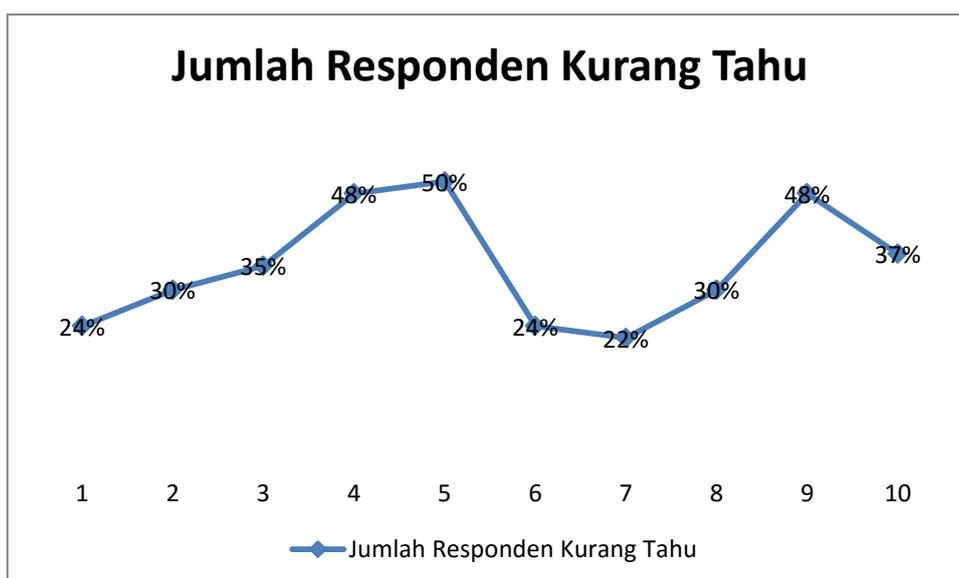
Hasil kuisisioner yang digunakan dalam penelitian di tabel V.1. akan diperjelas dengan menggunakan gambar V.1 yang merupakan grafik hasil penelitian di bawah ini.



Gambar V.1. Jumlah Responden yang tahu dari 10 (sepuluh) pertanyaan

Penilaian responden terhadap pertanyaan yang pertama dari 50 pertanyaan yang disediakan adalah jumlah responden yang tahu adalah 74%, jumlah responden tahu dengan pertanyaan 2 (ke dua) adalah sebanyak 63%, jumlah responden tahu dengan pertanyaan 3 (ke tiga) adalah sebanyak 52%, jumlah responden tahu dengan pertanyaan 4 (ke empat) adalah sebanyak 24%, jumlah responden tahu terhadap pertanyaan 5 (ke lima) adalah sebanyak 22%, jumlah responden tahu terhadap pertanyaan 6 (ke enam) adalah sebanyak 46%, jumlah responden tahu terhadap pertanyaan 7 (ke tujuh) adalah sebanyak 35%,

jumlah responden tahu terhadap pertanyaan 8 (ke delapan) adalah sebanyak 59%, jumlah responden tahu terhadap pertanyaan nomor 9 (ke sembilan) adalah sebanyak 39% dan jumlah responden tahu terhadap jawaban nomor 10 adalah sebanyak 43%. Berdasarkan distribusi responden maka jawaban responden yang tahu dengan pertanyaan pertama itu lebih banyak dibanding dengan pertanyaan yang lainnya yaitu sebanyak 74% itu artinya bahwa dari 50 responden tersebut pada dasarnya adalah banyak yang mengetahui tentang program Jaminan Kesehatan Nasional tetapi



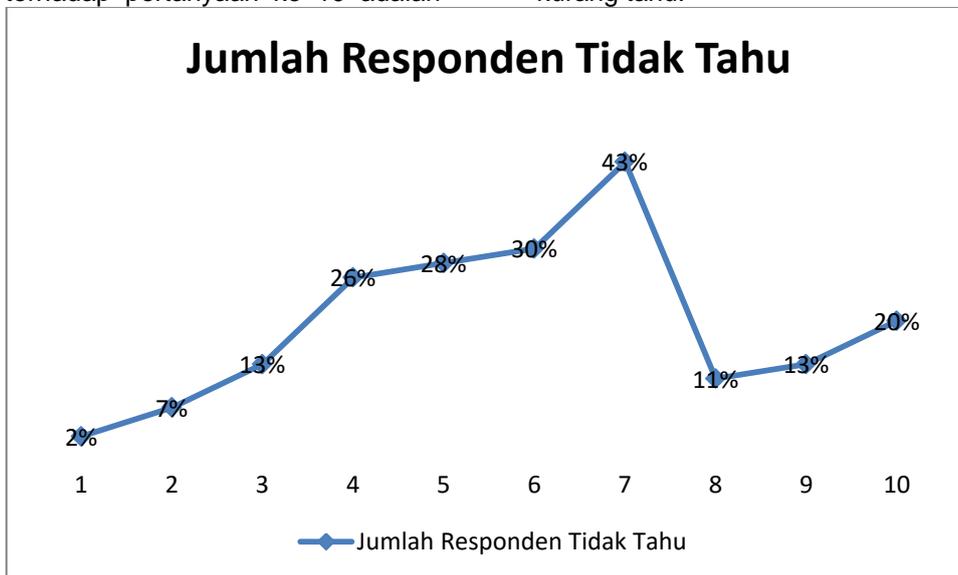
Gambar V.2. Jumlah Responden yang kurang tahu dari 10 (sepuluh) pertanyaan

Penilaian responden terhadap jawaban kurang tahu yaitu pada pertanyaan ke 1 jumlah responden yang kurang tahu adalah 24%, pada pertanyaan ke 2 jumlah responden yang kurang tahu adalah 30%, terhadap pertanyaan ke 3 jumlah responden kurang tahu adalah 35%,

selanjutnya jumlah responden yang kurang tahu terhadap pertanyaan ke 4 adalah sebanyak 48%, jumlah responden kurang tahu terhadap pertanyaan ke 5 adalah 50%, jumlah responden yang kurang tahu terhadap pertanyaan ke 6 adalah sebanyak 24%, jumlah responden kurang

tahu terhadap pertanyaan ke 7 adalah sebanyak 22%, jumlah responden kurang tahu terhadap pertanyaan ke 8 adalah 30%, dan jumlah responden kurang tahu terhadap pertanyaan ke 9 adalah sebanyak 48 % serta jumlah responden kurang tahu terhadap pertanyaan ke 10 adalah

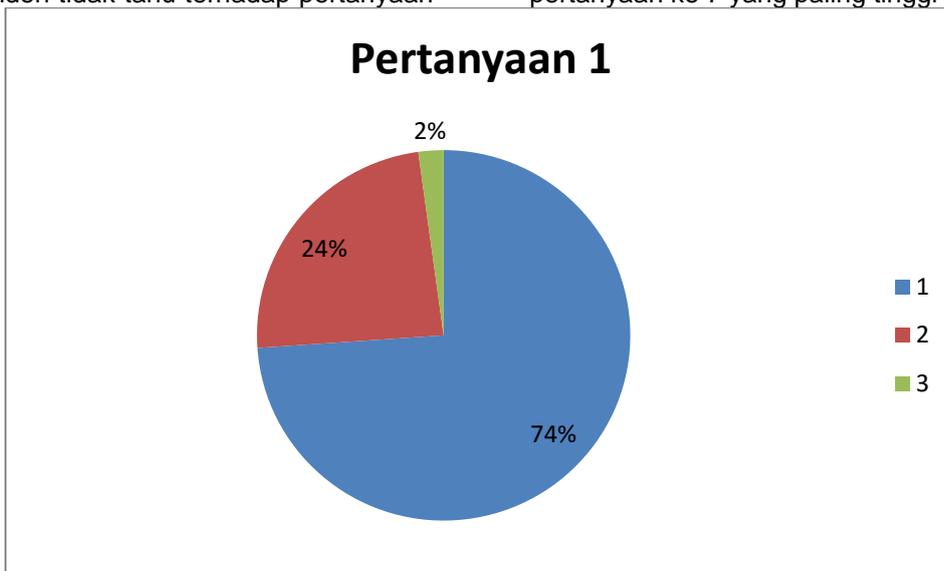
sebanyak 37%. Ini berarti dari 50 responden jumlah responden yang kurang tahu terhadap pertanyaan ke 5 yaitu mencapai 50 % hal ini jumlahnya lebih tinggi di banding dengan pertanyaan yang lain untuk kategori respon yang kurang tahu.



Gambar V.3. Jumlah Responden yang tidak tahu dari 10 (sepuluh) pertanyaan

Penilaian responden terhadap jawaban yang tidak tahu adalah jumlah responden yang memiliki jawaban tidak tahu terhadap pertanyaan ke 1 yaitu sebanyak 2%, jumlah responden tidak tahu terhadap pertanyaan ke 2 adalah sebanyak 7%, jumlah responden tidak tahu terhadap pertanyaan ke 3 adalah sebanyak 13%, jumlah responden tidak tahu terhadap pertanyaan ke 4 adalah sebanyak 26%, jumlah responden tidak tahu terhadap pertanyaan ke 5 adalah sebanyak 28%, jumlah responden tidak tahu terhadap pertanyaan

ke 6 adalah sebanyak 30%, jumlah responden tidak tahu terhadap pertanyaan ke 7 adalah sebanyak 43%, jumlah responden yang tidak tahu terhadap pertanyaan ke 8 adalah sebanyak 11%, jumlah responden yang tidak tahu terhadap pertanyaan ke 9 adalah sebanyak 13% dan jumlah responden tidak tahu terhadap pertanyaan ke 10 adalah sebanyak 20%. Artinya bahwa dari 50 responden yang memiliki jawaban tidak tahu dari 10 pertanyaan tersebut adalah pada pertanyaan ke 7 yang paling tinggi yaitu 43%.



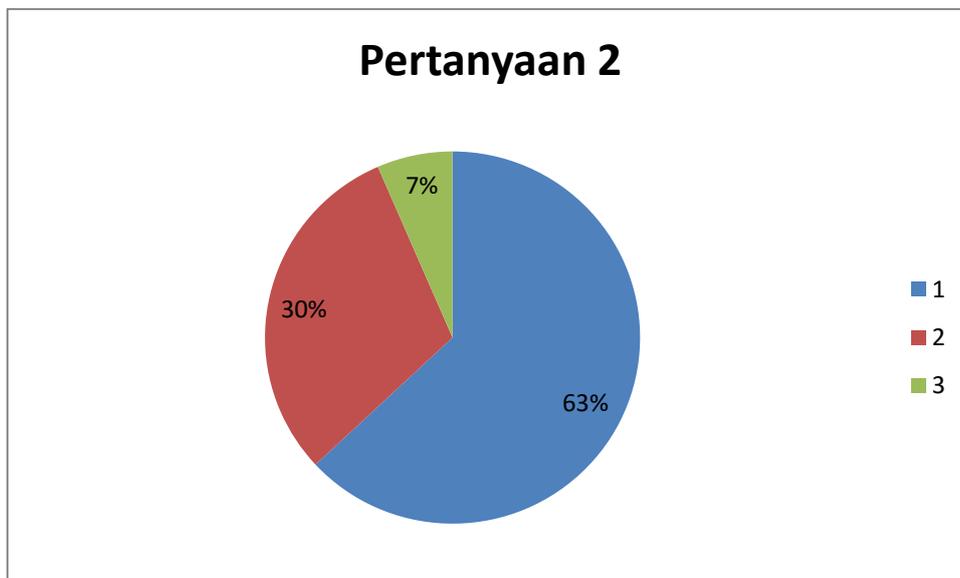
Gambar V.4. Persentase Respon terhadap Pertanyaan 1

Persentase responden terhadap pertanyaan pertama adalah yang memiliki persentase paling tinggi adalah jawaban responden tahu yaitu sebanyak 74%, Ini artinya bahwa responden yang

mengetahui program jaminan kesehatan itu sebanyak 74% tersebut berarti masyarakat atau responden sebagian besar mengetahui tentang program atau kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah tentang pentingnya jaminan kesehatan nasional yang menjadi prioritas utama

bagi reformasi pembangunan kesehatan di Indonesia.



Gambar V.4. Persentase Respon terhadap Pertanyaan 2

Persentase responden terhadap pertanyaan ke 2 adalah jumlah responden tahu terhadap pertanyaan ke 2 yaitu sebanyak 63%, Ini artinya bahwa responden yang tahu pertanyaan ke 2 tentang tujuan diadakannya JKN lebih banyak

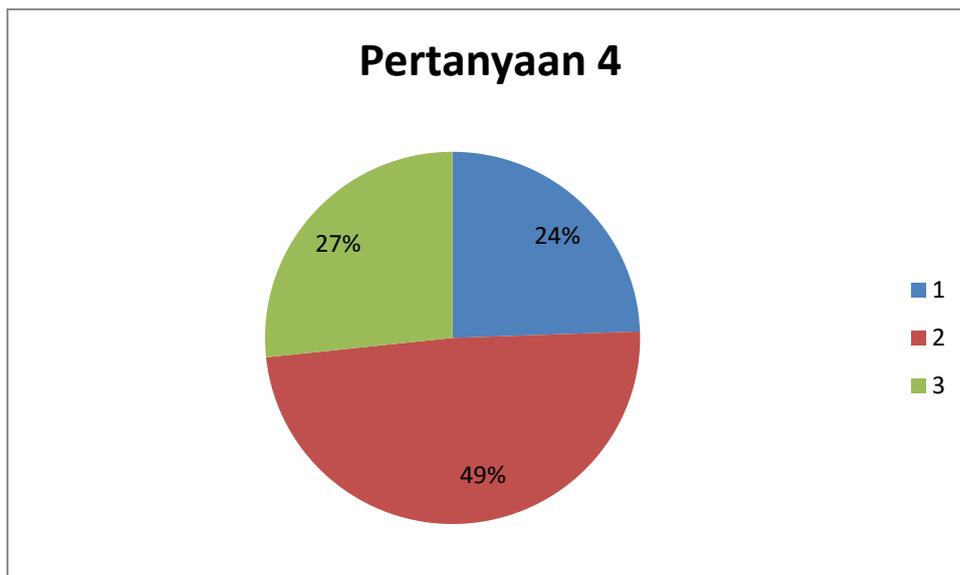
responden mengetahui tentang apa yang menjadi akhir dari tujuan dikeluarkannya kebijakan pemerintah yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia hal ini berdasarkan ketentuan undang-undang.



Gambar V.4. Persentase Respon terhadap Pertanyaan 3

Persentase responden terhadap pertanyaan ke 3 yaitu jumlah responden tahu terhadap pertanyaan ke 3 adalah sebanyak 52%, Ini artinya bahwa jumlah responden yang mengetahui pertanyaan tentang anggota JKN itu paling banyak yaitu 52%. Dilihat dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti

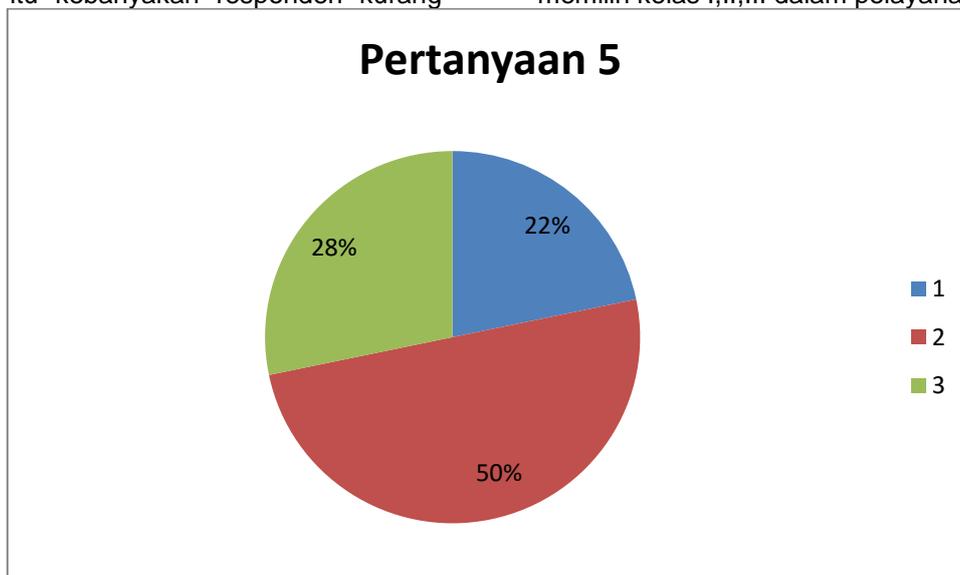
bahwa responden atau masyarakat sangat paham sekali mengenai siapa saja yang menjadi anggota JKN dimana anggota JKN ini diwajibkan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut .



Gambar V.4. Persentase Respon terhadap Pertanyaan 4

Persentase respon terhadap pertanyaan ke 4 adalah jumlah respon paling banyak yaitu 49% untuk respon kurang tahu, kemudian jumlah respon tidak tahu sebanyak 27% dilanjutkan dengan respon tahu sebanyak 24%. Artinya bahwa respon terhadap pertanyaan ke 4 tentang peserta PBI itu kebanyakan responden kurang

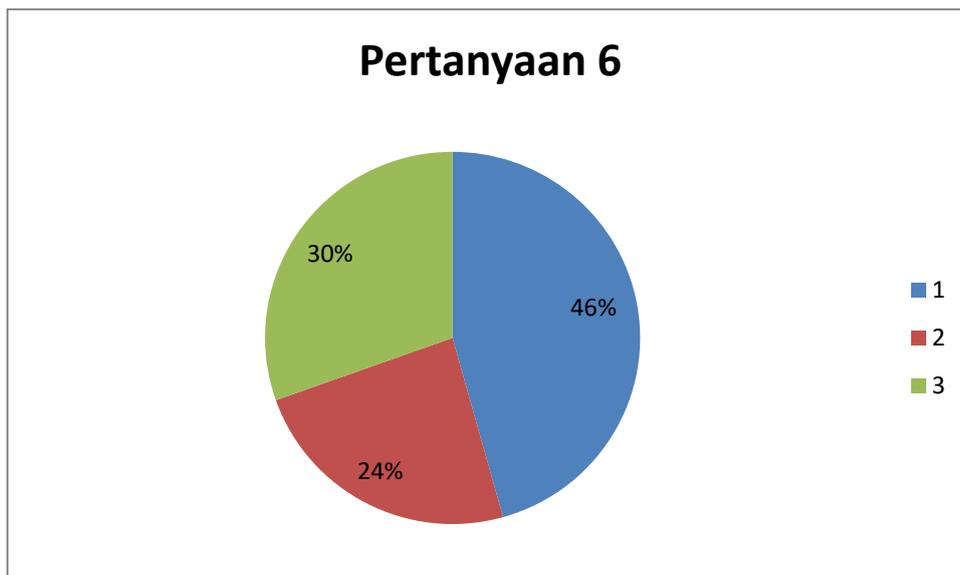
tahu tentang istilah tersebut hal ini dikarenakan masyarakat atau responden kurang mendapat informasi atau sosialisasi dari pihak pemerintah sendiri tentang jenis-jenis peserta yang tanpa iuran atau PBI dan peserta yang non PBI artinya peserta yang membayar sendiri iurannya untuk memilih kelas I,II,III dalam pelayanan.



Gambar V.4. Persentase Respon terhadap Pertanyaan 5

Persentase respon terhadap pertanyaan ke 5 yaitu jumlah respon terhadap pertanyaan ke 5 adalah jumlah respon kurang tahu sebanyak 50%,. Artinya bahwa respon terhadap pertanyaan ke 5 tentang istilah peserta non PBI adalah responden banyak yang kurang tahu tentang istilah tersebut yaitu persentase sebanyak 50%.

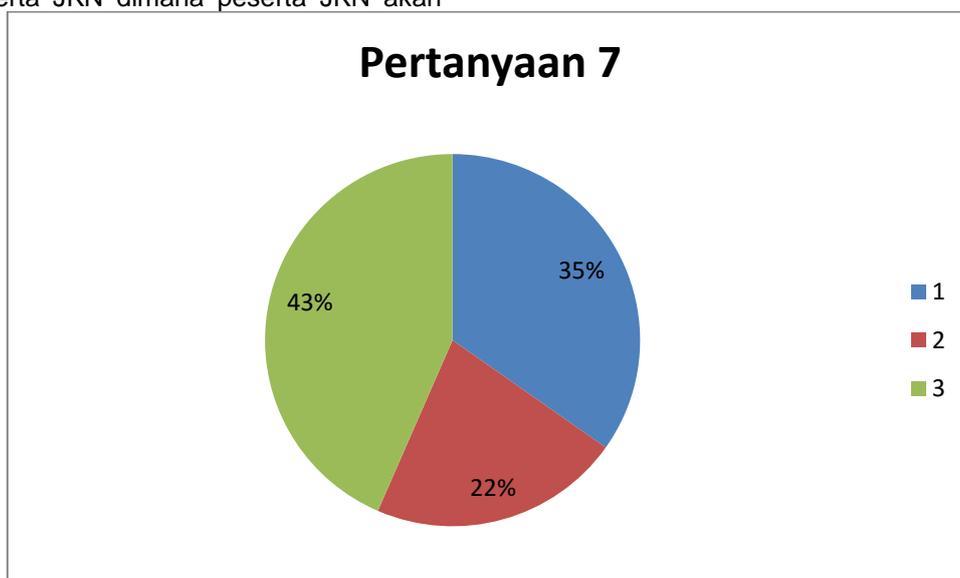
Dalam point pertanyaan ke 5 tersebut bahwa sangat diperlukan bagi responden dan masyarakat secara umum untuk mengetahui istilah yang dipergunakan dalam program JKN karena masyarakat perlu mengetahui apakah dirinya terdaftar sebagai peserta PBI maupun Non PBI sehingga dapat dibedakan.



Gambar V.4. Persentase Respon terhadap Pertanyaan 6

Persentase respon terhadap pertanyaan ke 6 adalah jumlah respon terhadap pertanyaan ke 6 yaitu jumlah respon tahu sebanyak 46% tentang iuran peserta JKN ini berarti bahwa responden atau masyarakat mengetahui dengan jelas mengenai iuran yang akan dibayar apabila menjadi peserta JKN dimana peserta JKN akan

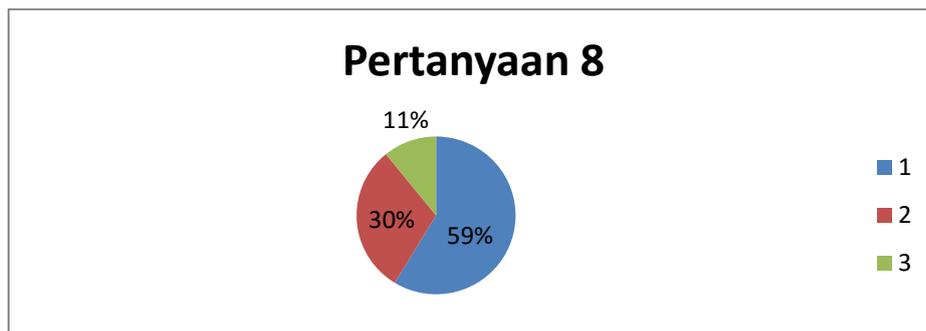
memilih sendiri kelas-kelas pelayanan kesehatan yang dikehendaki sesuai dengan kelas yang dipilih apakah kelas I, kelas II dan kelas III yang tentunya responden tahu tentang perbedaan pembayaran atau iuran bagi kelas-kelas yang dipilih apabila mendaftar sebagai peserta JKN.



V.4. Persentase Respon terhadap Pertanyaan 7

Persentase respon terhadap pertanyaan ke 7 adalah jumlah respon kurang tahu sebanyak 43% tentang denda keterlambatan iuran JKN. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat atau responden sangat perlu tahu tentang hal-hal yang penting dalam program JKN tersebut dan point ke

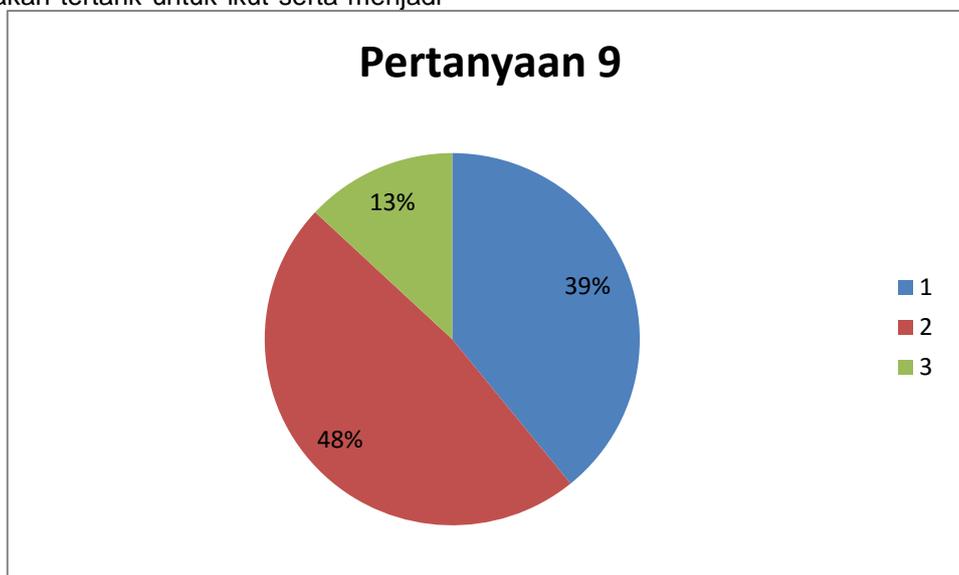
7 ini perlu diketahui dan dipahami tentang adanya denda keterlambatan apabila sudah menjadi peserta JKN sehingga bagi masyarakat yang akan mendaftar sebagai peserta akan mengetahui konsekuensi apabila tidak membayar berturut-turut maka akan dihentikan pelayanan kesehatannya.



V.4. Persentase Respon terhadap Pertanyaan 8

Persentase respon terhadap pertanyaan ke 8 adalah jumlah respon tahu sebanyak 59% tentang manfaat sebagai peserta JKN. Hal ini dapat disimpulkan bahwa mengenai pertanyaan pada poin 8 tersebut responden sebagian besar mengetahui manfaat yang ditawarkan oleh program JKN sehingga kemungkinan besar masyarakat akan tertarik untuk ikut serta menjadi

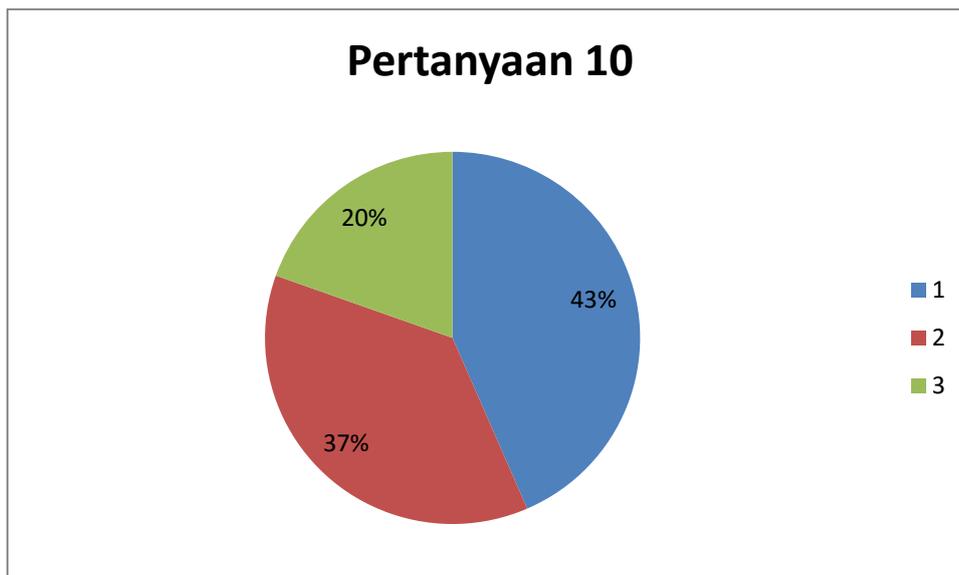
peserta JKN karena sistem dari JKN itu sendiri adalah sistem gotong royong dimana istilahnya yang kuat membantu yang lemah artinya peserta yang taraf ekonominya lebih tinggi akan membantu peserta yang taraf ekonominya rendah sehingga disebut dengan sistem kegotong royongan.



V.4. Persentase Respon terhadap Pertanyaan 9

Persentase respon terhadap pertanyaan ke 9 yaitu jumlah respon kurang tahu sebanyak 48% yaitu tentang jenis pelayanan dari program JKN adalah banyak yang kurang tahu. Ini berarti responden hanya mengetahui secara umum saja tentang program pemerintah tentang JKN

sehingga hal-hal yang memang seharusnya diketahui tentang jenis-jenis pelayanan yang ditawarkan oleh JKN itu sendiri masyarakat kurang mengetahui, hal ini disebabkan kurang pengetahuan atau kurang sosialisasi dari pemerintah/ pihak yang terkait.



V.4. Persentase Respon terhadap Pertanyaan 10

Persentase respon terhadap pertanyaan nomor 10 adalah jumlah respon tahu sebanyak 43% ini artinya bahwa respon terhadap pertanyaan ke 10 tentang perbedaan pelayanan antara peserta dengan yang bukan peserta adalah respon banyak yang mengetahui tentang hal tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan responden tentang perbedaan pelayanan Jaminan Kesehatan nasional dengan yang bukan peserta JKN biasanya banyak diketahui oleh masyarakat melalui peserta JKN yang sudah terdaftar sebagai peserta sehingga responden membandingkan mengenai perbedaan pelayanan yang diperoleh bagi peserta JKN dan bukan peserta JKN.

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Respon masyarakat Desa Teros terhadap program pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bahwa pada umumnya masyarakat Desa Teros mengetahui tentang program pemerintah tersebut tetapi secara khusus masyarakat kurang mengetahui berbagai istilah dalam program tersebut. Hal ini dilihat dalam kwisioner sebanyak 50 lembar yang disebar ke warga masyarakat desa teros secara acak bahwa berdasarkan distribusi umur responden, umur 30-40 tahun yang lebih banyak berpartisipasi dan paling sedikit umur 50 tahun. Kemudian berdasarkan pekerjaan responden yang di luar grafik atau mempunyai pekerjaan lain memiliki partisipasi paling banyak 39%. Berdasarkan hasil kwisioner yang disebar kepada 50 responden dari 10 pertanyaan yang disediakan bahwa program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang bersifat wajib bagi masyarakat, sebenarnya masyarakat sudah mengetahui tentang program tersebut baik itu membaca lewat media massa maupun dilihat dalam media televisi mengenai program tersebut tetapi masyarakat

desa teros masih kurang faham aturan-aturan atau prosedur-prosedur yang harus di tempuh untuk berpartisipasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional tersebut, padahal program ini sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama di daerah pedesaan karena diketahui bahwa bagi masyarakat yang kurang mampu maka biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh pemerintah tetapi hal ini harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

2. SARAN

Diharapkan bagi pemerintah bahu-membahu dalam melaksanakan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dan pemerintah atau pihak yang terkait diharapkan turun ke masyarakat untuk memeberikan pengetahuan dasar atau informasi tentang JKN karena salah satu penyebab minimnya pengetahuan mengenai program pemerintah tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait dalam memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa jaminan kesehatan sangat penting untuk dilaksanakan supaya masyarakat terjamin akan pelayanan kesehatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Edi Suharto, 2013, *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*, Bandung, Alfabeta.
- Navijan Janis, 2014, *Makalah BPJS Kesehatan, Supply and Demand terhadap Layanan Kesehatan*

- Sulastomo, 2008, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Sri Rejeki Hartono, 2006, *Asuransi dan Hukum Asuransi*, IKIP Semarang Press, Semarang.
- Blanko Informasi, 2015, *Panduan Layanan Bagi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan*.
- 2014, *Cara Mendaftar BPJS Kesehatan*.
www.hukumonline.com, 2014, *Perlu Usaha Bersama Sempurnakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*